

**PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA**



**KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 060/466/B.11/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 060/93/B.11/2017 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
TAHUN 2016-2021**



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 060/466/B.11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 060/93/B.11/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Utara disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021;
- c. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

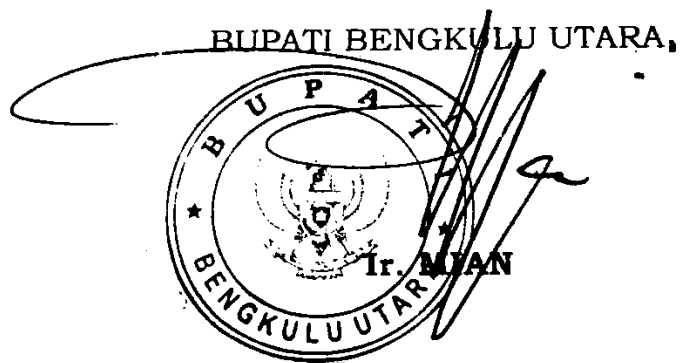
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/93/B.11/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/93/B.11/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24-11-2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 060/466/B.11/2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR
 060/93/B.11/2017 TENTANG INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
 UTARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
Misi 1 : Membangun Pemerintahan yang Adil dan Berwibawa		
‘1.1.1 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Secara Proporsional Sesuai Kebutuhan Spesifik Wilayah	Jumlah Pusat Pertumbuhan	DPUPR, DPMD, SETDAKAB
‘1.4.1 Terkelolanya Sumber Dana Dan Pembiayaan Pembangunan Secara Transparan Akuntabel Dan Profesional (‘3.B.5)	Opini atas Audit Tahunan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pemeriksa Keuangan	INSPEKTORAT, BPKAD, BAPENDA, SETDAKAB
	Implementasi Penyelenggaraan SPIP berupa Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
	Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah daerah	BAPPEDA, SETDAKAB, Inspektorat Daerah
‘1.5.1 Meningkatnya Ketertiban Masyarakat (4A5)	Angka Kriminalitas	Polres BU, Satpol PP & PK
‘1.7.1 Membaiknya Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Bagi Terciptanya Keseimbangan Antara Aspek Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Kota Sehat/Adipura (Ev)	Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai Modal Pertumbuhan Ekonomi Dengan Aspek Perlindungan Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sebagai Penopang Sistem Kehidupan Secara Luas (1D1)		
'1.9.1 Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	POLRES BU, DPPPA
'1.10.1 Menurunnya Resiko Akibat Bencana Alam	Indeks Resiko Bencana	BPBD, Dinas Sosial
1.11.1 Meningkatnya Keadilan Ekonomi Dalam Masyarakat	Angka Kemiskinan	BAPPEDA, DINSOS, DISNAKERTRANS, DISKOP DAN UKM, SETDAKAB, DPRKP, DINAS PERIKANAN, DINKES, DIKBUD, DTPHP, DISBUN, DISDAG, DPUPR
	Prosentase Masyarakat Miskin Yang Diberikan Motivasi Dan Advokasi	BAPPEDA DAN DINSOS, DISNAKERTRANS, DISKOP DAN UKM, SETDAKAB, DPRKP, DINAS PERIKANAN, DINKES, DIKBUD, DTPHP, DISBUN, DISDAG
	Prosentase Masyarakat Miskin Produktif Yang Diberikan Pelatihan Keterampilan	DISNAKERTRANS, DISKOP DAN UKM, DINSOS, DISDAG, BAPPEDA
	Prosentase Masyarakat Miskin Yang Memiliki Jaminan Sosial	DINSOS, SETDAKAB, DINKES, DISPENSIK BAPPEDA, BPJS
	Prosentase Munculnya Wirausaha/Kelompok Wirausaha Baru Masyarakat Miskin Produktif	DISKOP DAN UKM, DISNAKERTRANS, DISDAG, DINSOS, BAPPEDA

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas		
'2.2.1 Meningkatnya Mobilitas Antar Wilayah (1.1.A.2.4)	Rata-rata Kecepatan Lalu Lintas Kendaraan Roda-4 Di Jalan Kabupaten (Aksesibilitas)	DPUPR, DISHUB
'2.2.2 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan/Non Perpipaan Di Seluruh Kawasan Permukiman ('2.2.E.2.1)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	DPRKP, PDAM DPUPR, KECAMATAN
'2.2.3 Meningkatnya Jangkauan Pelayanan Komunikasi Dan Informasi	Jangkauan Penerima Frekuensi Siaran Publik Pemerintah Kabupaten	DISKOMINFO
'2.3.1 Tersedianya Subsidi Terkait Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ('2.2.E.1.3)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	DPRKP
2.3.2 Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Permukiman Yang Berkualitas	Jumlah Permukiman Kumuh	DPRKP DPUPR, DLH, KECAMATAN
Misi 3 : Membangun Pelayanan Masyarakat		
3.1.1 Meningkatnya Aksebilitas Dan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan, DINKES, DINSOS
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Dinas Pendidikan
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Dinas Pendidikan
	Jumlah Siswa Yang Menerima Beasiswa Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Memiliki Yang Bersertifikat (%)	Dinas Pendidikan
	Angka Buta Aksara (Ev)	Dinas Pendidikan
'3.1.2 Meningkatnya Aksebilitas Dan Mutu Pelayanan Bidang Kesehatan ('2.2.B.1.)	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk (per 1000 penduduk)	Dinas Kesehatan, DPPKB

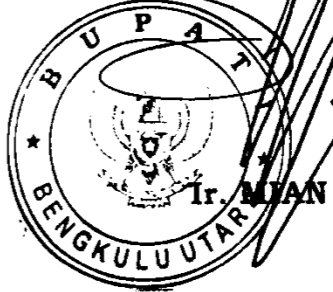
	Persentase Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik	Dinas Kesehatan
	Status Rumah Sakit Arga Makmur	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight)	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kecamatan Yang Belum Memiliki Puskesmas (Kecamatan) (Ev)	Dinas Kesehatan
3.1.3 Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan ('2.2.B.1.)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan (Ev)	Dinas Penanaman Modal, DISKOMINFO, BALITBANG, KECAMATAN
	Izin Yang Dikeluarkan Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal, DLH, BAPPEDA, DISPENDIK, KECAMATAN,
3.1.4 Meningkatkan Aksebilitas Dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dokumen Kependudukan Yang Selesai Tepat Waktu	DISDUKCAPIL, KECAMATAN
Misi 4 : Membangun Ekonomi Kerakyatan		
'4.1.1 Meningkatnya Produksi Pertanian Dan Perikanan Di Sentra-Sentra Produksi Dengan Tetap Mendorong Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Serta Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Berupa Hasil Ternak Dan Ikan. '(1.1.B.2)	1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Komoditi Lokal (2.07.16)	DINAS PERDAGANGAN DTPHP, DINAS PERIKANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN
	2. Inovasi dan Implementasi Teknologi Dalam Peningkatan Produksi Pertanian/Perikanan (2.01.17)	DTPHP & DINAS PERIKANAN
	3. Indikator Bidang Pertanian:	
	3. a. Infrastruktur Pertanian Dan Perikanan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	3. b. Skore Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan

	3. n. Produksi Padi (ton/tahun) (Ev)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, DPUPR, KECAMATAN, TNI
	3. o. Produksi Jagung (ton/tahun) (Ev)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, DPUPR, KECAMATAN, TNI
	4. Indikator Bidang Perikanan	
	4. a. Konsumsi Ikan (kg/orang/thn)	Dinas Perikanan
	4. h. Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	Dinas Perikanan, DPUPR, KECAMATAN, DTPHP
	5. Indikator Bidang Peternakan : (Ev)	
	5. b. Produksi Daging Sapi (ton/tahun) (Ev)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, SATPOL PP DAN PBK
	5. f. Jumlah Unit Pengolahan Hasil Ternak Yang Direvitalisasi (unit) (Ev)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
	6. Indikator Bidang Perkebunan : (Ev)	
	6. a. Produksi Kelapa Sawit (ton/tahun) (Ev)	Dinas Perkebunan
	6. b. Produksi Karet (ton/tahun) (Ev)	Dinas Perkebunan
'4.2.1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pariwisata (1E1) Melalui Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (1E4)	Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata, BAPPEDA, DTPHP, KECAMATAN, DINKES, DISHUB, DISPORA

4.3.1 Meningkatnya Kinerja Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Dan BUMDes Dalam Penyediaan Permodalan Bagi Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Aktif	Dinkop dan UKM
	Jumlah BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.5.1 Meningkatnya Daya Saing Sistem Integrasi Sapi Dan Kelapa Sawit (SISKA)	Jumlah Kelompok Pengelola SISKA	DINAS PERKEBUNAN, DTPHP DISKOP DAN UKM, SATPOL PP DAN PBK
4.5.2 Meningkatkan Daya Saing Kawasan Minapolitan	Jumlah Wirausaha	KOPERASI DAN UKM, DISDAG, DINAS PERIKANAN, BALITBANG
4.5.3 Meningkatkan Daya Saing Kawasan Pariwisata Berbasis Pariwisata Maritim	Jumlah Event Pariwisata Yang Dilaksanakan	Dinas Pariwisata
Misi 5 : Membangun Sumber Daya Manusia		
5.1.2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah Wirausaha Baru	DISNAKERTRANS
5.1.3 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Lulusan S1/S2/S3	DISPENDIK, DISNAKERTRANS
	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Sertifikat Kompetensi (orang) (ev)	DISNAKERTRANS
	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan, Keterampilan Dan Keahlian Dalam Memulai Usaha (orang) (Ev)	DISNAKERTRANS
5.2.1 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, DINKES, KECAMATAN

5.3.1 Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Perencanaan, Penyelenggaran Dan Pengawasan Pembangunan	Pembangunan Pusat Kegiatan Pemuda Dan Olah Raga (Sport Center)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5.4.1 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	DPPKB

BUPATI BENGKULU UTARA,



Ir. M. HAN

